

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA

Salsabila Putri, Joko Suharianto
Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, UNIMED
Email: salsabilaptr70@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis implikasi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta dana desa terhadap *Human Development Index* (HDI) di Indonesia dalam rentang periode 2019–2023. Temuan analisis mengindikasikan bahwa transfer umum memberikan efek kontraproduktif dan secara statistik tidak bermakna terhadap HDI dengan estimasi koefisien -1,236560 serta probabilitas 0,6542. Transfer khusus terindikasi memberikan efek positif dan signifikan terhadap HDI dengan parameter koefisien 0,611793 serta probabilitas 0,0024. Adapun transfer desa memperlihatkan efek kontradiktif namun signifikan terhadap HDI dengan estimasi koefisien -9,062973 serta probabilitas 0,0142. Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut dapat menjelaskan keragaman HDI sebesar 80%, sementara sisanya 20% ditentukan oleh variabel eksternal lain di luar kerangka model penelitian. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi transfer fiskal yang bersumber dari otoritas pusat perlu diorientasikan secara lebih efektif dan efisien agar selaras dengan tujuan peningkatan mutu pembangunan manusia di Indonesia.

Kata kunci Kata Kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis implikasi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, serta dana desa terhadap *Human Development Index* (HDI) di Indonesia dalam rentang periode 2019–2023. Temuan analisis mengindikasikan bahwa transfer umum memberikan efek kontraproduktif dan secara statistik tidak bermakna terhadap HDI dengan estimasi koefisien -1,236560 serta probabilitas 0,6542. Transfer khusus terindikasi memberikan efek positif dan signifikan terhadap HDI dengan parameter koefisien 0,611793 serta probabilitas 0,0024. Adapun transfer desa memperlihatkan efek kontradiktif namun signifikan terhadap HDI dengan estimasi koefisien -9,062973 serta probabilitas 0,0142. Secara simultan, ketiga variabel independen tersebut dapat menjelaskan keragaman HDI sebesar 80%, sementara sisanya 20% ditentukan oleh variabel eksternal lain di luar kerangka model penelitian. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi transfer fiskal yang bersumber dari otoritas pusat perlu diorientasikan secara lebih efektif dan efisien agar selaras dengan tujuan peningkatan mutu pembangunan manusia di Indonesia.

Kata kunci Kata Kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Desa, Indeks Pembangunan Manusia, Indonesia.

1. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Pengembangan individu ialah pemajuan yang memiliki sistem atau teknik serta mempunyai tujuan dan target untuk lebih luas dibandingkan pilihan, khususnya dalam bidang pendidikan, pendapatan, dan kebugaran. Pemajuan juga merupakan sebuah tahapan menghasilkan sesuatu yang baru atau menyempurnakan kualitas yang telah ada (Todaro & Smith, 2012). Salah satu aspek yang dijadikan tolok ukur dapat diamati ialah Indeks Pengembangan Manusia (IPM), yakni elemen kunci dalam mengevaluasi capaian guna mendukung pengembangan kualitas dan kesejahteraan hidup individu dalam arti memakmurkan masyarakat. Sumber Daya Manusia yang mumpuni adalah aset utama yang paling mendasar bagi pemajuan sebuah bangsa.

Berdasar UNDP (Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa), Ukuran Pengembangan Manusia ialah sebuah tolok ukur untuk menilai level pengembangan sebuah negara yang menitikberatkan pada pemajuan alternatif bagi warga. Ini menaksir tingkat kemajuan pembangunan dengan menggunakan rasio pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) per kapita dan diyakini mampu memperbesar kesempatan kerja serta menghasilkan prospek ekonomi. Ukuran Pengembangan Manusia berperan sebagai instrumen yang bermanfaat bagi negara dan otoritas dalam menetapkan strategi pembangunan serta menilai pencapaian yang telah terealisasi terkait peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan BPS (Badan Pusat Statistik), terdapat tiga parameter pokok yang membentuk Ukuran Pengembangan

Manusia, yaitu: Ukuran Keanekaragaman Hayati, Ukuran Pendidikan, dan Ukuran Standar Biodegradabilitas. Konsep Pengembangan Manusia pertama kali diajukan oleh PBB dan telah membentuk peringkat capaian pengembangan manusia berdasarkan Human Development Index (HDI). Skema penilaian ini berada dalam kisaran 0 sampai 100, di mana skor 0 termasuk kategori pengembangan manusia sangat tinggi dengan HDI di atas 80, kategori tinggi berikutnya memiliki HDI antara 70 dan 80, tingkat menengah memiliki HDI antara 60 dan 70, dan tingkat paling rendah memiliki HDI di bawah 60. Hal ini menandakan bahwa Ukuran Pengembangan Manusia menjadi instrumen bermanfaat dalam menilai level pembangunan suatu negara dan memfasilitasi pemerintah dalam menentukan arah pengembangan yang relevan dengan kebutuhan warga.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ialah rasio mutu manusia dalam pengembangan individu menurut UNDP (nilai berada dalam kisaran 0–100). Laju pertumbuhan IPM pada tahun 2020 melambat di seluruh provinsi Indonesia. Dari segi peringkat, evaluasi IPM antarprovinsi relatif stabil dan tidak mengalami banyak perubahan. Skor IPM tertinggi tetap dicapai oleh DKI Jakarta (80,77), sementara skor terendah berada di Papua (60,44). Bila disandingkan dengan nilai nasional, terdapat 11 provinsi yang mencatat IPM di atas rata-rata nasional.

Pada tahun 2020, 24 provinsi menunjukkan kenaikan IPM, sedangkan 10 provinsi lainnya mengalami penurunan. IPM Sumatera Utara tahun 2020 tercatat 71,77, berada di peringkat ke-14 dari 34 wilayah di Indonesia,

memperlihatkan perlunya pengembangan sumber daya manusia di Sumatera Utara, yang didukung oleh kekayaan luar biasa wilayah tersebut. Selain itu, beragam energi dan sumber daya alam Sumatera Utara memiliki signifikansi global. Sumatera Utara berpeluang menjadi pelaku ekonomi internasional karena besarnya potensi sumber daya yang dimiliki.

2. KAJIAN TEORI

Konsep Pembangunan Manusia

Merujuk pada *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam publikasinya “*Human Development Report*”, diperkenalkan gagasan “*Pembangunan Kualitas Kehidupan Manusia (Human Development)*” sebagai paradigma baru pembangunan. Menurut UNDP, pembangunan manusia diuraikan sebagai perluasan alternatif bagi individu (*enlarging people's choices*), yang dapat dipandang sebagai rangkaian ikhtiar untuk memperluas pilihan sekaligus sebagai hasil dari proses tersebut. *Human development* juga dapat dimaknai sebagai penguatan kapabilitas individu melalui peningkatan kondisi jasmani, pengetahuan, dan keterampilan serta sebagai pemanfaatan kompetensi atau keahlian yang dimiliki. Berdasarkan laporan (United Nations Development Programme, 1995), terdapat sejumlah gagasan pokok yang berkaitan dengan pembangunan manusia, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembangunan sebaiknya menempatkan penduduk sebagai fokus utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Hal ini berarti setiap keputusan dan strategi pembangunan harus mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi, dan kesejahteraan masyarakat sebagai titik sentral, sehingga setiap upaya pembangunan dapat benar-benar meningkatkan kualitas hidup penduduk secara menyeluruh.
- b. Tujuan pembangunan bukan hanya sekadar meningkatkan pendapatan atau kekayaan materi penduduk, tetapi lebih kepada memperluas berbagai opsi dan peluang yang tersedia bagi mereka, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi sosial.
- c. Pembangunan manusia tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan kapasitas, keterampilan, atau pengetahuan individu, tetapi juga menekankan pentingnya memanfaatkan kemampuan tersebut secara efektif dan produktif. Artinya, pembangunan harus menciptakan kesempatan bagi penduduk untuk menerapkan kompetensi yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari, baik di sektor ekonomi, sosial, maupun budaya, sehingga kemampuan yang ada tidak hanya berkembang, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat.
- d. Empat landasan pokok yang menjadi dasar pembangunan manusia mencakup produktivitas, distribusi yang adil, keberlangsungan, serta penguatan kapasitas masyarakat. Produktivitas memastikan masyarakat mampu menghasilkan nilai tambah; pemerataan menjamin kesempatan dan manfaat pembangunan dirasakan secara adil; keberlanjutan menjaga agar sumber daya alam dan sosial dapat dimanfaatkan tanpa merusak generasi mendatang; dan pemberdayaan menekankan penguatan

kapasitas individu serta komunitas agar mereka mampu mengambil keputusan dan berperan aktif dalam proses pembangunan.

- e. Pembangunan manusia menjadi acuan utama dalam menetapkan sasaran dan strategi pembangunan, sekaligus menjadi kerangka untuk mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan. Dengan mengutamakan manusia sebagai pusat, setiap pilihan dan prioritas pembangunan dapat dianalisis dari perspektif bagaimana hal tersebut meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kapasitas masyarakat, sehingga tujuan pembangunan yang direncanakan benar-benar dapat dicapai secara efektif dan berkelanjutan.

Sasaran terakhir dari pengembangan adalah kemakmuran masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi fokus pembangunan, mereka harus berperan sebagai penggerak agar dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi perkembangan bangsa, yakni kemajuan nasional pada skala makro. (Prasetyo & Sulaiman, 2022) dalam (Davies & Quinlivan, 2006; Yuliani & Saragih, 2014) menekankan bahwa kesuksesan pembangunan dinilai melalui sejumlah indikator, namun yang paling dikenal saat ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), yang menakar mutu pendidikan, kesejahteraan jasmani, dan kondisi ekonomi (kemampuan membeli).

IPM merupakan indeks komposit yang menilai tiga aspek pokok pengembangan manusia yang dipandang menunjukkan kapasitas fundamental manusia: usia panjang dan bugar, ilmu, serta kehidupan bermutu. Proses

penentuan indikator pembangunan manusia tidak terpisahkan dari falsafah dan konseptualisasi pembangunan manusia. Terdapat beragam pendekatan serta istilah yang diaplikasikan dalam konteks pembangunan manusia. Dikaitkan dengan hal ini, Gilley dan Eggland menyatakan bahwa pembangunan manusia mengacu pada peningkatan (kemajuan) dalam pengetahuan, kompetensi dan perilaku sumber daya manusia itu sendiri untuk kepentingan individu dan organisasi. Dengan demikian, Gilley dan Eggland mengemukakan dua persoalan ketika mendiskusikan *human development*, yakni: (1) Apa kegunaan pembangunan manusia sebagai landasan bagi pengembangan organisasi? (2) Pengembangan seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan organisasi?

Kesuksesan pengembangan manusia bergantung pada performa pemerintah. Ia berperan dalam menciptakan peraturan untuk mewujudkan ketertiban sosial. Realisasi Sasaran Pengembangan Manusia yang tergambar dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sangat dipengaruhi oleh tekad pihak berwenang sebagai penyedia bantuan. Selanjutnya, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memberikan kesempatan kepada masyarakat dari semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Konsep pengembangan manusia tidak berdiri sendiri secara eksklusif. Gagasan pembangunan yang ada tetap sejalan dengan konsep *human development*. Pengembangan manusia bukan hanya hasil dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berperan sebagai penyumbang utama bagi perkembangan ekonomi. Karena itu,

kemajuan ekonomi dan pembangunan manusia perlu berjalan bersamaan. Pengembangan manusia senantiasa berperan sebagai persoalan pokok dalam rancangan dan pendekatan pembangunan yang lestari (Rusdiana & Ibrahim, 2020).

3. METODOLOGI PENELITIAN

LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Lokasi dan waktu penelitian yang akan dilakukan ini berada di Indonesia. Penelitian ini akan dilaksanakan dari bulan Maret 2023 sampai dengan selesai.

RUANG LINGKUP PENELITIAN

Data yang digunakan dalam studi ini termasuk data kuantitatif. Data kuantitatif adalah informasi yang memiliki ciri angka atau berupa nilai numerik. Penelitian dilakukan di Indonesia selama periode lima tahun (2019-2023) untuk mengamati dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

JENIS DAN SUMBER DATA

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan analisis data panel. Data panel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan data time series tahun 2019-2023 dan *cross section* yang diambil dari 33 provinsi di Indonesia yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan adalah data Indeks Pembangunan Manusia, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Desa.

VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL

Variabel merupakan setiap hal dalam berbagai wujud yang ditentukan periset untuk dikaji sehingga diperoleh keterangan mengenai hal tersebut, lalu diambil konklusinya (Kuncoro Mudrajad, 2013). Ada dua faktor riset, yakni variabel dependen dan variabel independen. Di dalam penelitian ini menggunakan empat variabel yang terdiri dari variabel independen yaitu Dana Alokasi Umum (X1), Dana Alokasi Khusus (X2), Dana Desa (X3). Untuk variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (Y). Berikut penjabaran definisi tiap variabel yang dipakai pada penelitian ini, yaitu:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN dan disalurkan setiap tahun kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota sesuai porsi kewenangan yang telah ditetapkan. Alokasi dana dari APBN ini bertujuan untuk menyeimbangkan kapasitas keuangan antarwilayah, sehingga masing-masing daerah mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pemerintahan.
- b. Dana Alokasi Khusus adalah pembiayaan yang timbul dari pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk wilayah tertentu serta dialokasikan tiap tahun ke wilayah dalam unit miliar. Anggaran ini memiliki maksud untuk pembiayaan kegiatan spesifik wilayah yang sejalan dengan keutamaan nasional.

- c. Dana Desa merupakan asal pembiayaan yang ditentukan pemerintahan pusat lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kampung dan wilayah kurang berkembang guna mendukung pemerintahan daerah dalam pengembangan daerahnya yang dialokasikan tiap tahun dalam unit miliar.
- d. Indeks Pembangunan manusia (IPM) yang juga dikenal sebagai *Human Development Index* (HDI), merupakan indikator terpadu untuk menilai capaian mutu kemajuan masyarakat agar dapat menjalani kehidupan yang lebih bermutu, mencakup kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Informasi yang dimanfaatkan dalam riset ini berupa data IPM pada 33 provinsi di Indonesia selama periode 2019–2023 yang dinyatakan dalam bentuk numerik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap IPM Di Indonesia

Berdasarkan hasil regresi parsial, diketahui bahwa DAU di Indonesia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Nilai koefisien yang diperoleh sebesar -1,236560, yang berarti apabila DAU meningkat 1 satuan, maka Indeks Pembangunan Manusia justru mengalami penurunan sebesar 1,236560 satuan, demikian pula sebaliknya. Variabel DAU mempunyai besaran peluang senilai 0,6542, yang mana nilai tersebut melampaui 0,05. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa Dana Alokasi Umum

tidak menimbulkan dampak bermakna pada Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan teori yang diungkapkan (Musgrave 2012) dan (Jo Oates 1972) dimana transfer fiskal dari pemerintah pusat ke daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan fiskal antar wilayah, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, serta memperkuat penyediaan layanan publik dasar yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan meningkatnya belanja publik untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, maka secara logis indeks pembangunan manusia akan terdorong naik.

Akan tetapi, temuan studi tersebut sesuai dengan studi (Sodik, J., & Nuryadin 2018) yang menemukan bahwa anggaran penyaluran umum tidak memengaruhi secara signifikan indeks pembangunan manusia di Indonesia, serta (Pratama 2019) yang menyebutkan bahwa dampak anggaran penyaluran umum terhadap indikator pembangunan manusia malah bersifat negatif. Kondisi ini dapat dijelaskan karena anggaran penyaluran umum pada faktanya lebih besar dipakai guna menutupi pengeluaran pegawai dan kebutuhan rutin daerah dibandingkan pengeluaran produktif untuk pendidikan, kesehatan, serta peningkatan taraf hidup masyarakat.

Alasan logis dari hasil ini adalah bahwa meskipun nominal dana alokasi umum meningkat setiap tahunnya, alokasi penggunaannya di tingkat daerah sering kali tidak efektif dalam mendorong pembangunan manusia. Porsi terbesar dari dana alokasi umum digunakan untuk belanja rutin, khususnya pembayaran gaji aparatur sipil negara, sehingga

kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak relatif kecil. Selain itu, lemahnya tata kelola dan perencanaan anggaran di beberapa daerah membuat potensi dana alokasi umum tidak termanfaatkan optimal untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa walaupun secara konseptual anggaran penyaluran umum diantisipasi memberi pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia, tetapi dalam kenyataannya temuan studi memperlihatkan kecenderungan yang berbeda. Hal itu disebabkan Dana dari alokasi umum tersebut belum diarahkan secara optimal untuk mendorong pembangunan manusia, melainkan lebih banyak terserap oleh pengeluaran rutin. hasil ini dapat dijelaskan bahwa meskipun nominal DAU meningkat setiap tahunnya, alokasi penggunaannya di tingkat daerah sering kali belum efektif dalam mendorong pembangunan manusia.

Hasil penelitian yang senada juga ditemukan oleh (N. S. Pratama et al., 2025) yang mengungkapkan bahwa DAU memiliki korelasi negatif terhadap IPM karena dominasi penggunaan anggaran pada belanja rutin dan belum kuatnya orientasi pemerintah daerah terhadap pembangunan manusia. (Herlambang & Rachmawati, 2023) menegaskan bahwa efektivitas penggunaan dana transfer sangat menentukan (Rachmawati et al., 2022) sejauh mana transfer fiskal mampu mendorong peningkatan IPM, sementara menemukan bahwa tingginya proporsi belanja pegawai dari DAU menghambat peningkatan kualitas layanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

Hal ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan fiskal daerah, terutama dalam aspek alokasi dan pengawasan penggunaan DAU agar lebih produktif dan berdampak langsung pada peningkatan IPM. Bersifat negatif serta tidak signifikan, dampak anggaran penyaluran umum terhadap indeks pembangunan manusia menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatannya dalam mendorong pembangunan manusia masih terbatas, dan lebih banyak difokuskan pada pengeluaran rutin dibandingkan dengan pengeluaran produktif yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

1.1.1 4.5.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap IPM di Indonesia

Berdasarkan analisis regresi secara parsial dapat diketahui bahwa dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di indonesia. Nilai koefisien yang diperoleh sebesar 0,611793, yang bermakna apabila variabel lain dianggap konstan dan dana alokasi khusus meningkat sebesar 1 satuan, maka nilai indeks pembangunan manusia akan meningkat sebesar 0,611793 satuan, demikian pula sebaliknya. Variabel Dana Alokasi Khusus menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0024, dimana nilai ini $< 0,05$. Dengan demikian, diperoleh keputusan untuk menolak H_0 dan menerima H_a , yang berarti dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan *teori fiscal federalism* oleh (Jo Oates 1972) bahwa transfer fiskal bersifat spesifik seperti dana alokasi khusus lebih efektif dalam meningkatkan pelayanan publik karena dialokasikan sesuai prioritas tertentu yang mendukung

peningkatan kualitas sumber daya manusia, misalnya bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. variabel DAK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Meskipun temuan penelitian bertentangan dengan (Nashshar & Mulyana, 2022) hasilnya sejalan dengan (Riviando et al., 2019). Pada dasarnya tujuan dana alokasi khusus untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan beberapa arah kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus adalah dana transfer khusus, yang digunakan secara khusus untuk membiayai inisiatif daerah yang menjadi prioritas nasional. DAK dapat berkontribusi pada pembangunan manusia dengan penggunaan yang telah ditetapkan. Ini dapat berkontribusi pada pelayanan dasar seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

Selain itu, menguatkan Teori Musgrave (1959) juga menekankan fungsi alokasi pemerintah yang harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan barang publik esensial. Dengan sifat *earmarked fund*, dana alokasi khusus lebih terarah sehingga lebih mudah berdampak positif terhadap indeks pembangunan manusia dibandingkan dana alokasi umum yang sifatnya umum(Musgrave 2012).

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan(Wicaksono 2020), (Purbadharma, I. B. P., & Anggraeni 2019), dan (Sari 2021) yang menemukan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Secara logis, hasil ini dapat dijelaskan karena dana alokasi khusus

memang memiliki peruntukan yang spesifik. Misalnya, dana alokasi khusus bidang pendidikan digunakan untuk pembangunan sekolah, penyediaan sarana belajar, dan peningkatan kualitas guru; sementara dana alokasi khusus bidang kesehatan digunakan untuk pembangunan puskesmas, rumah sakit, penyediaan alat kesehatan, dan peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Melalui penekanan alokasi tersebut, Dana Alokasi Khusus memberikan pengaruh nyata terhadap komponen Indeks Pembangunan Manusia, yakni pendidikan, kesehatan, serta tingkat kelayakan hidup. Berbeda dengan Dana Alokasi Umum yang umumnya terserap pada belanja pegawai, Dana Alokasi Khusus diarahkan untuk pembiayaan modal yang lebih produktif.

Secara teoritis, pengaruh positif DAK terhadap IPM dapat dijelaskan melalui fungsi utama DAK sebagai dana yang dialokasikan secara khusus (*earmarked fund*) untuk membiayai program-program prioritas nasional yang berkaitan langsung dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Ketiga sektor tersebut merupakan dimensi utama penyusun IPM, yaitu umur harapan hidup, tingkat pendidikan, dan standar hidup layak. Menurut UNDP (2020), investasi pemerintah pada layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan merupakan faktor terpenting dalam peningkatan kualitas manusia, sehingga semakin besar intervensi fiskal pada layanan dasar, semakin tinggi capaian pembangunan manusia.

Oleh karena itu, dapat dirumuskan bahwa anggaran distribusi tertentu memberi dampak menguntungkan dan nyata atas indikator pengembangan masyarakat di Indonesia. Temuan tersebut sejalan dengan konsep otonomi keuangan

(Oates) dan pendekatan distribusi Musgrave, serta diperkuat oleh aneka studi sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal berbasis earmarked fund seperti dana alokasi khusus terbukti lebih efektif dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dibandingkan transfer fiskal yang sifatnya umum.

Pengaruh Dana Desa Terhadap IPM di Indonesia tahun 2019 - 2023

Berdasarkan analisis regresi secara parsial dapat diketahui bahwa dana desa memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Nilai koefisien yang diperoleh sebesar -9.062973 , yang bermakna apabila variabel lain dianggap konstan dan dana desa mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka nilai indeks pembangunan manusia akan menurun sebesar 9.062973 satuan, demikian pula sebaliknya. Variabel dana desa menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.0142, dimana nilai ini $< 0,05$ sehingga diperoleh keputusan untuk menolak H_0 dan menerima H_a , yang berarti dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di indonesia.

Hasil penelitian ini menguatkan teori sebelumnya, *teori community development* oleh Chambers (1987) yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal sebagai basis peningkatan kualitas hidup. Selain itu, menurut teori desentralisasi fiskal Oates (1972), transfer dana ke level pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penyediaan layanan publik, termasuk yang berhubungan dengan dimensi indeks pembangunan manusia (pendidikan,

kesehatan, standar hidup). Temuan ini menunjukkan bahwa penyaluran Dana Desa belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pembangunan manusia pada banyak daerah di Indonesia. Secara teoritis, Dana Desa idealnya digunakan untuk membiayai pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan dasar, serta penguatan ekonomi lokal. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, peningkatan Dana Desa justru tidak selalu berdampak positif terhadap indikator kesehatan, pendidikan, maupun standar hidup layak yang menjadi komponen utama IPM.

Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wulandari (2020) yang menemukan bahwa Dana Desa tidak selalu memberikan kontribusi positif terhadap indeks pembangunan manusia, bahkan cenderung negatif jika pengelolaannya tidak tepat. Penelitian Saputri & Hadi (2019) juga menunjukkan bahwa meskipun dana desa meningkat, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat masih terbatas karena sebagian besar realisasi anggaran digunakan untuk pembangunan fisik, bukan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Hasil ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Dana desa di banyak daerah masih lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, balai desa. Dibandingkan pada sektor yang secara langsung memengaruhi dimensi indeks pembangunan manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan. Kemudian permasalahan tata kelola, seperti rendahnya kapasitas aparatur desa, lemahnya perencanaan, dan kurangnya pengawasan, menyebabkan

efektivitas Dana Desa dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi rendah. Adanya indikasi moral hazard dan penyalahgunaan dana desa di sejumlah daerah juga berpotensi membuat pemanfaatannya tidak berdampak signifikan pada pembangunan manusia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun secara teoritis Dana Desa seharusnya meningkatkan indeks pembangunan manusia, hasil penelitian ini menunjukkan arah sebaliknya. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan dana desa masih menghadapi persoalan efektivitas dan akuntabilitas dalam implementasinya. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dalam penggunaan dana desa agar lebih diarahkan pada program-program yang langsung meningkatkan kualitas sumber daya manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Merujuk pada temuan analisis dan uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam studi ini sebagai berikut:

Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia (Ho diterima).

Dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia (Ho ditolak).

Dana desa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia (Ho diterima).

Dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana desa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia (Ho ditolak) dengan besaran

kontribusi sebesar 80,58%, dan sisanya 19,42% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel penelitian.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

Pemerintah daerah perlu membuat kebijakan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAU melalui pengalokasian anggaran pada sektor-sektor yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Selama ini, sebagian besar DAU masih didominasi untuk belanja pegawai sehingga kontribusinya terhadap peningkatan IPM belum optimal. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prioritas penggunaannya serta meningkatkan kapasitas aparatur dalam perencanaan anggaran berbasis kebutuhan publik agar DAU dapat digunakan secara lebih produktif.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus mengoptimalkan pemanfaatan DAK, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang berhubungan langsung dengan indikator IPM. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan penyerapan DAK dan memperkuat perencanaan program agar penggunaan anggaran ini lebih tepat sasaran. Selain itu, pengawasan terhadap implementasi program berbasis DAK harus diperketat, sehingga pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, sanitasi, dan infrastruktur dasar lainnya dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pemerintah harus mencapai keseimbangan dalam pengalokasian dana desa dimana pemerintah desa perlu melakukan perbaikan tata kelola Dana Desa melalui perencanaan pembangunan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program Dana Desa hendaknya lebih difokuskan pada kegiatan yang mendukung peningkatan IPM, seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, perbaikan gizi, pembangunan fasilitas kesehatan dan pendidikan dasar, serta peningkatan akses air bersih. Selain itu, pendamping desa juga perlu memperkuat pengawasan dan pendampingan terutama bagi desa yang memiliki kapasitas perencanaan anggaran yang masih rendah. Perencanaan pembangunan sebaiknya dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program, dan semua anggaran dapat saling melengkapi untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang serupa terutama yang berkaitan dengan indeks kemahalan konstruksi serta penelitian selanjutnya dapat menyempurnakan data dan hasil penelitian yang

DAFTAR PUSTAKA

- Arrow, K. J., Lind, R. C., De Haven, J. C., & Milliman, J. W. (2013). *Uncertainty And The Evaluation Of Public Investment Decisions*.
Ajija, Shochrul Rohmatul, dkk.(2011). *Cara Cerdas Menguasai Eviews*. Jakarta: Salemba Empat.
Bps. (2014). *Pertumbuhan Ekonomi 2014*. Bps Indonesia.

- Davies, A., & Quinlivan, G. (2006). A Panel Data Analysis Of The Impact Of Trade On Human Development. *The Journal Of Socio-Economics*, 35(5), 868–876.
Halim, A. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan Dan Pengeluaran Pemerintah*. Salemba Empat.
Harahap, A. Z. (2021). *Implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Dinas Penanaman Modal dan pelayanan perizinan anter padu Satu Pintu (Dpm & Pptsp)* Kota Binjai. Univeristas Negeri Medan Area.
Hasan, M. (2015). Pengaruh Dana Transfer Pusat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan. *Jurnal Economix*, 3(1).
Herlambang, B., & Rachmawati, N. S. A. (2023). Pengaruh Pdrb, Ipm, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 27(1), 52–60. <Https://Doi.Org/10.24123/Jeb.V27i1.5732>
Jo Oates, W. E. (1972). Fiscal Federalism. New York: Harcourt Brace Jovanovich. *Journal Of Economic Literature*, 46(2), 237–243.
Lestari, P., Sarfiah, S. N., & Prasetyanto, P. K. (2018). Analisis Pengaruh Dau, Dak, Dan Dbh Terhadap Ipm Di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2012-2016. *Dinamic : Directory Journal Of Economic*, 1(1).
Malik, M., Sjarlis, S., & Gusti, D. H. (2022). Program Pascasarjana Magister Manajemen, Itb Nobel Indonesia Makassar 2 Program

- Pascasarjana Magister Manajemen, Itb Nobel Indonesia Makassar 3 Program Pascasarjana Magister Manajemen, Itb Nobel Indonesia Makassar. In *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia* (Vol. 3).
- Msi, H., Ustiawaty, J., & Juliana Sukmana, D. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
<Https://Www.Researchgate.Net/Publication/340021548>
- Musgrave, R. A. (2012). Fiscal Policy For Economic Growth. In *Economists' Voice* (Vol. 9, Issue 2).
<Https://Doi.Org/10.1515/1553-3832.1898>
- Muslihah, S., Octavana Siregar, H., Ekonomika Dan Bisnis Sekolah Vokasi Jl Profdrmrdrs Notonegoro, D., & Akuntansi Ykpn Jl Gagak Rimang, A. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 7(1), 85–93.